

Kecenderungan Antipluralisme Guru-Guru Pendidikan Agama Islam di MAN Dompu

Muhammad Amin

email: Nurrahmawati221093@gmail.com

Abstrak : *Sebagai negara yang menempatkan agama sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa adalah penting untuk melihat kembali pendidikan agama di lingkungan sekolah untuk mereduksi konflik yang sering muncul di tanah air. Apa yang salah dengan pendidikan agama, sehingga agama yang seharusnya tampil sebagai pengayom dan terompet moral yang keras dalam berbagai dimensi kehidupan, ternyata justru sering dituduh sebagai biang munculnya kekerasan. Agama yang semestinya hadir sebagai energi sosial untuk melawan ketidakadilan, mencegah konflik ternyata menjadi faktor dominan meletusnya konflik. Oleh karena itulah, memberikan pemahaman agama yang inklusif dan toleran yang mampu melahirkan kerja sama di bidang kemanusiaan melalui pendidikan agama sangat mutlak diperlukan di Indonesia dalam rangka untuk meredam konflik, dan mencegah timbulnya kekerasan atas nama agama.*

Kata Kunci: *Anti, Pluralisme, Pendidikan, Islam.*

A. Latar Belakang

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam satu dekade ini banyak diwarnai dengan kekerasan-kekerasan, terutama kekerasan atas nama agama. Fenomena tersebut bisa dilihat mulai dari kekerasan yang terjadi di Ambon (1995), Poso (1991), peristiwa peledakan bom di malam Natal (2000) di Atrium Senin Jakarta, Bom Bali (2002) yang

menewaskan hampir 200 nyawa, peledakan bom di hotel JW Marriot (2003) dan Bom di Tentena dan terakhir yang masih terngiang di telinga kita, yaitu Bom Bali II, belum lagi peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi di berbagai penjuru Indonesia yang bisa dikategorikan berbau agama. Hal ini seakan mempertegas kembali bahwa pemahaman masyarakat terhadap agama masih bersifat eksklusif dan intoleran.

Pemahaman agama yang demikian tentu sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia yang secara realitas sangat beragam dan plural, baik dari segi ras, kepercayaan dan agama. Keberagaman masyarakat Indonesia yang tidak diikuti dengan pemahaman yang inklusif dan toleran inilah yang sering menimbulkan kekerasan demi kekerasan tersebut.

Sebagai negara yang menempatkan agama sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa adalah penting untuk melihat kembali pendidikan agama di lingkungan sekolah untuk mereduksi konflik yang sering muncul di tanah air. Apa yang salah dengan pendidikan agama, sehingga agama yang seharusnya tampil sebagai pengayom dan terompet moral yang keras dalam berbagai dimensi kehidupan, ternyata justru sering dituduh sebagai biang munculnya kekerasan. Agama yang semestinya hadir sebagai energi sosial untuk melawan ketidakadilan, mencegah konflik ternyata menjadi faktor dominan meletusnya konflik. Oleh karena itulah, memberikan pemahaman agama yang inklusif dan toleran yang mampu melahirkan kerja sama di bidang kemanusiaan melalui pendidikan agama sangat mutlak diperlukan di Indonesia dalam

rangka untuk meredam konflik, dan mencegah timbulnya kekerasan atas nama agama.

Di samping itu, selama ini ada persepsi yang keliru tentang fungsi dan peran pendidikan. Pendidikan terutama pendidikan agama yang semestinya bertujuan utama untuk membentuk peradaban dan pendewasaan sikap, ternyata telah menjadi pendidikan yang nomor dua setelah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini juga pernah disinggung oleh mantan menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar pada "Simposium Kebangkitan Jiwa" yang diselenggarakan oleh Forum Kebangkitan Jiwa, pada Rabu, 6 Maret 2002, bahwa pendidikan telah lama menjadi alat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi belaka, dan bukan diorientasikan pada pembentukan peradaban, sehingga telah terjadi proses dehumanisasi dalam pendidikan.¹

Pernyataan mantan Mendiknas tersebut jelas menggambarkan bahwa umumnya masyarakat Indonesia menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mengejar ekonomi. Orientasi ini menyebabkan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan moral dan mental spritual, seperti pendidikan agama menjadi dinomorduakan. Tidak heran kalau ada asumsi bahwa salah satu penyebab lunturnya nilai-nilai toleransi dan pluralisme agama pada masyarakat Indonesia terjadi karena nilai-nilai pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah kurang diminati dan dihayati. Dari sini timbul pertanyaan, apa yang salah dengan metode pengajaran agama-agama di dunia pendidikan kita? Apakah tidak diminatinya pendidikan agama disebabkan oleh pergeseran orientasi

¹Pikiran Rakyat, 7 Maret 2002

belaka ataukah pendekatan pengajaran agama yang tidak lagi menarik dan membosankan?

Dalam konteks demikian, maka ada persoalan serius yang terjadi dalam pendidikan agama di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari visi, tujuan, kurikulum, pilihan buku wajib, literatur, dan yang tidak kalah pentingnya adalah guru yang menyampaikan dan penyikapannya terhadap kemajemukan yang masih menyisakan banyak problematika. Ada dugaan bahwa pengajaran agama yang dilakukan oleh guru-guru agama lebih condong menekankan pada sisi formalisme, ritualisme dan eksklusivisme.² Hal ini terjadi karena Guru-guru Pendidikan Agama di sekolah-sekolah tidak pluralis, sehingga pengajaran agama hanya berhenti pada persoalan-persoalan ibadah semata dan bersifat kognitif dan belum sampai kepada bagaimana merangsang dan mendorong siswa terlibat dalam pemahaman agama yang lebih inklusif serta secara afektif membuahkan transformasi diri dalam tataran nilai. Tidak berlebihan jika siswa sering mendapatkan pengetahuan agama yang berbasis eksklusivisme, di antaranya siswa saling mengkafirkan, menyalahkan agama lain, kurang menghormati orang yang berbeda agama, menganggap agamanya yang benar dan yang lain salah, karena itu kehadiran agama lain dianggap sebagai ancaman, akibatnya benih-benih konflik terus bermunculan, sehingga agama yang dipahami siswa adalah saling memusuhi antara satu dengan yang lain (*eksklusive*).

B. Implementasi Pendidikan Kritis dalam Pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Amin Dompu.

²Jawa Pos, 11 Mei 2003

Penerapan prinsip pendidikan kritis di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Amin Dompu pada dasarnya telah menerapkan beberapa prinsip pendidikan kritis seperti prinsip komunikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Habermas bahwa secara tegas Habermas membedakan dua tindakan dasar manusia, yakni tindakan kerja dan tindakan komunikasi. Tindakan kerja (rasional-bertujuan) maupun tindakan komunikatif adalah tindakan dasar manusia dalam kehidupannya. Dalam konteks sosial, tindakan komunikatif harus menjadi tindakan yang melandasi hubungan manusia dengan sesamanya sebagai sesama subjek. Tindakannya terhadap sesamanya akan bersifat dialogal karena manusia berinteraksi melalui simbol yang dipahami secara intersubjektif (Freire, 2004:98).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa setiap akan terjadi sebuah tindakan dalam proses perkuliahan selalu terjadi komunikasi yang harmonis dan saling pengertian antara dosen dan mahasiswa seperti dalam hal pemindahan jadwal perkuliahan yang disebabkan oleh salah satu dari keduanya tidak bisa hadir pada jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak perguruan tinggi dan keterlambatan yang salah satu dari keduanya yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor cuaca dan faktor kesibukan serta penentuan tema perkuliahan. Begitupun para dosen yang mengusahakan terjadinya sebuah komunikasi dengan mahasiswa terkait tema perkuliahan yang akan dibahas dalam perkuliahan.

Para dosen memastikan akan adanya komunikasi untuk menyatukan antara apa yang diinginkan oleh dosen dan apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Hal ini dilakukan supaya terjadi sebuah hubungan yang harmonis antara dosen dan mahasiswa yaitu hubungan yang tidak saling menindas antara pihak dosen dan pihak mahasiswa. Salah satu dosen menegaskan jika terjadi ketidaksesuaian keinginan antara dosen dan mahasiswa terkait tema perkuliahan yang akan didiskusikan maka solusinya adalah dengan mengkomunikasikan kembali dengan mahasiswa.

Adanya komunikasi yang harmonis ini menjadi penting dalam penerapan prinsip pendidikan kritis dalam pendidikan Islam karena dalam konteks relasi antara mahasiswa dan dosen, komunikatif harus menjadi tindakan yang melandasi hubungan dosen dengan mahasiswanya sebagai sesama subjek bukan subjek-objek. Tindakannya terhadap sesama akan bersifat dialogal karena manusia berinteraksi melalui simbol yang dipahami secara intersubjektif. Dari sinilah kemudian prinsip pendidikan kritis bisa diterapkan dalam pendidikan Islam atau menurut Habermas inilah yang disebut dengan tindakan komunikatif yang harus ada dalam setiap relasi, baik itu relasi antara orang tua dan anak, pemerintah dan rakyat dan juga antara dosen dan mahasiswanya.

Meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat sebagian kecil yang menuntut adanya proses pengaturan tema-tema perkuliahan yang akan disampaikan kepada mahasiswa, namun kemudian mereka tetap mengadakan *sharing* dan dialog dengan mahasiswa setelah itu mereka

mengadakan evaluasi terkait hasil dialog dengan mahasiswanya lalu kemudian memutuskan tema apa yang paling cocok untuk didiskusikan dalam kelas perkuliahan. Hal ini dia lakukan dengan alasan bahwa dia berperan sebagai pengarah, kalau ada saran dari mahasiswa yang keluar dari tema besar mata kuliah yang diampuh maka dia akan segera mengarahkan agar kembali pada koridor mata kuliah yang diampuh.

Prinsip pendidikan kritis menolak hubungan vertikal dalam pendidikan. Melalui dialog, pendidik dan peserta didik tidak ada lagi, sehingga muncul suasana baru, yakni pendidik- yang- peserta didik dengan peserta didik -yang-menjadi pendidik. Pendidik tidak lagi menjadi orang yang mengajar, tetapi orang yang mengajar dirinya melalui dialog dengan para peserta didik yang pada gilirannya di samping diajar mereka juga mengajar. Mereka bertanggungjawab terhadap suatu proses di mana mereka tumbuh dan berkembang. Dalam proses ini pendapat-pendapat yang didasarkan pada wewenang tidak berlaku lagi, agar dapat berfungsi lagi wewenang harus berpihak kepada kebebasan, bukan menentang kebebasan. Di sini tidak ada orang yang mengajar orang lain, atau mengajar dirinya sendiri. Manusia saling mengajar satu sama lain, ditengahi oleh dunia, oleh objek- objek yang dapat diamati yang dalam pendidikan gaya bank dimiliki oleh pendidik semata.

Dalam prinsip pendidikan kritis itu pendidik belajar dari peserta didik dan peserta didik belajar dari pendidik. Pendidik menjadi rekan peserta didik yang melibatkan diri dan merangsang daya pemikiran kritis para peserta didik. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama

mengembangkan kemampuan untuk mengerti secara kritis dirinya sendiri dan dunia tempat mereka berada (Freire, 2004:64-65). Jadi, prinsip pendidikan kritis di sini adalah pendidikan yang didesain untuk memecahkan problem tertentu. Artinya pendidikan kritis tidak bergerak hanya pada tataran teori saja, melainkan juga bergerak pada tataran praktis. Singkat kata, pendidikan hadap masalah menuntut adanya keseimbangan antara teori dan praktik.

Dari hasil penelitian juga didapatkan data dimana dosen dan mahasiswa merupakan subjek yang sama-sama sedang belajar dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainya dan yang menjadi objeknya adalah masalah-masalah sosial yang aktual yang sedang terjadi di masyarakat dengan tetap mempertahankan relevansinya dengan mata kuliah yang diampuh oleh seorang dosen.

Berdasarkan observasi penulis dimana saat proses perkuliahan beberapa dosen kerap kali merekayasa suasana pembelajaran dengan cara menjadikan problem sosial sebagai objek pembelajaran yang harus dicarikan solusi pemecahannya. Salah satu contohnya adalah salah satu dosen pernah mengajak mahasiswa untuk turun lapangan untuk mengamati proses perkembangan psikologi peserta didik dari tingkat SD, SMP, dan SMA serta sekaligus mewawancarai mereka karena salah satu masalah sosial yang terjadi di Kabupaten Dompu adalah kerap terjadinya perang antara kampung yang penyebab awalnya adalah kenakalan remaja. Para remaja kerap kali mengadakan acara rekreasi dengan membawa senjata tajam lalu dengan sedikit gangguan dari remaja kampung lain langsung terjadi pertikaian remaja yang pada

akhirnya nanti akan merembet pada perang antara kampung yaitu kampung kedua remaja yang bertikai tadi. Masalah ini juga yang akan meresahkan masyarakat umum karena masyarakat tidak berani mencari nafkah di kampung tetangga bagi yang berprofesi sebagai penjual sayur dan ikan. Bagi anak sekolah tidak berani pergi sekolah karena takut dicegat dan ditebas oleh musuh di tengah-tengah jalan. Dan ternyata dosen-dosen tersebut kerap kali membawa mahasiswa untuk turun lapangan untuk mengamati berbagai masalah sosial dan mencari solusi pemecahannya lalu mahasiswa diminta membuat laporan terkait hasil pengamatan mereka.

Dosen selalu berupaya untuk merekayasa proses perkuliahan agar sesuai dengan masalah sosial yang sebenarnya sedang terjadi dalam masyarakat dengan menganggap diri mereka sebagai perekayasa pembelajaran. Mereka menganggap untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam visi perguruan tinggi dibutuhkan sebuah rekayasa formal karena untuk konteks STAI Al-Amin Dompu tidak bisa menunggu keberhasilan implementasi prinsip pendidikan kritis dalam pendidikan Islam secara alamiah begitu saja karena prosesnya akan sangat lama sekali. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah kreatifitas para dosen untuk merekayasa sebuah pembelajaran yang dinamis dan inovatif yang perlu dikembangkan dan dimutakhirkan secara terus menerus sesuai kebutuhan mahasiswa. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, suasana pembelajaran telah dibentuk sedemikian rupa agar proses pembelajarannya dalam langsung beradaptasi dengan masalah-masalah yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan. Di samping menganggap

diri mereka sebagai perekayasa pembelajaran para dosen juga menganggap diri mereka sebagai pemandu pembelajaran yang sekaligus sebagai motivator pembelajaran bagi para mahasiswa.

Upaya lain yang dilakukan dosen STAI Al-Amin Dompu dalam menerapkan prinsip pendidikan kritis dalam pendidikan Islam di STAI Al-Amin Dompu adalah dengan cara merancang sedemikian rupa atmosfer akademik di STAI Al-Amin Dompu baik di lingkungan kampus, kelas ataupun pada saat proses perkuliahan. Rancangan atmosfer akademik ini dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan tantangan kepada mahasiswa untuk terus mengembangkan kapasitas intelektual mereka dan mendorong mereka juga untuk aktif dalam beberapa kegiatan-kegiatan keilmiah, seperti diskusi-diskusi ilmiah, bedah buku dan seterusnya. Setiap waktu dalam prosesnya, pendidikan seperti ini selalu merangsang mahasiswa ke arah diambilnya suatu tindakan kemudian tindakan tersebut direfleksikan kembali dan dari refleksi itu diambil tindakan baru yang lebih baik. Sehingga proses pendidikan merupakan suatu daur bertindak dan berpikir yang berlangsung terus menerus sepanjang hidup seseorang. Pada saat bertindak dan berpikir itulah seseorang menyatakan hasil tindakan dan buah pikirannya melalui kata-kata. Dengan belajar seperti itu, setiap mahasiswa secara langsung dilibatkan dalam permasalahan-permasalahan realitas dan keberadaan diri mereka di dalamnya. Pendidikan seperti inilah yang dimaksudkan Freire sebagai pendidikan hadap masalah.

Di samping itu, para dosen selalu menanamkan sifat keterbukaan kepada mahasiswa. Sifat keterbukaan ini dimaksudkan agar tidak ada *gap* (jarak) antara mahasiswa dan dosen yang menyebabkan mahasiswa bersikap canggung terhadap dosen mereka dengan imbas bahwa para mahasiswa menganggap dosen mereka sebagai orang yang harus mereka takuti dan mahasiswa tidak berani bertanya kepada dosen untuk meminta bimbingan dan arahan. Para dosen juga tidak membatasi mahasiswa untuk ikut salah satu aliran atau mazhab yang ada. Mereka menganggap itu merupakan bagian dari dinamika kehidupan keagamaan masyarakat. Oleh sebab itu, mereka mendorong mahasiswa untuk ikut terlibat dan masuk ke dalam organisasi-organisasi tersebut dengan tetap pada komitmen untuk tetap menjaga semangat kebersamaan sebagai umat Islam.

Selanjutnya, untuk mengimplementasikan prinsip pendidikan kritis dalam pendidikan Islam dosen memotivasi mahasiswa untuk memiliki pandangan yang ideal dalam menuntut ilmu. Tidak semata-mata menggunakan cara berpikir pragmatis yaitu dengan beranggapan tujuan berkuliah adalah hanya untuk mendapatkan ijazah dan dengan ijazah tersebut mereka akan mendapatkan pekerjaan. Motivasi yang diberikan ini bertujuan agar mahasiswa aktif melakukan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat internal seperti pengembangan potensi akademik dan kesadaran mahasiswa untuk berlembaga maupun eksternal seperti dalam bentuk kegiatan bakti sosial, seminar dan sebagainya.

Salah satu prinsip pendidikan kritis yang lain adalah pendidikan hadap masalah yang diintrodusir oleh Freire. Metode pendidikan hadap

masalah adalah kebalikan dari metode gaya Bank. Pendidikan yang membebaskan menurut Freire merupakan proses dimana pendidik mengkondisikan peserta didik untuk mengenal dan mengungkap kehidupan yang senyatanya secara kritis. Pendidikan yang membelenggu berusaha untuk menanamkan kesadaran yang keliru kepada peserta didik sehingga mereka mengikuti saja alur kehidupan ini, sedangkan pendidikan yang membebaskan tidak dapat direduksi menjadi sekedar usaha pendidik untuk memaksakan kebebasan kepada peserta didik. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan hadap masalah ini pertama kali menuntut pemecahan kontradiksi antara pendidik dan peserta didik. Hubungan dialogis yang harus ada pada para pelaku pemahaman untuk bersama-sama mengamati objek yang sama tidak dapat diwujudkan dengan cara lain (Freire, 2004:64).

C. Eksklusivisme

Dari lima informan GPAI yang berhasil diwawancarai di MAN Dompu, klaim-klaim yang memutlakkan kebenaran hanya dimiliki oleh satu agama saja, yaitu Islam selalu dijumpai ketika peneliti menanyakan tentang pengertian agama Islam dan posisinya terhadap agama lain. Hasil wawancara menyebutkan³ bahwa semua informan meyakini agama yang paling benar dan paling diridloi oleh Tuhan (Allah) adalah agama Islam. Islam adalah agama universal yang membawa Rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama yang paling sesuai dengan segala situasi dan kondisi, dan Islam adalah agama sepanjang masa sejak

³Wawancara dilaksanakan pada tanggal 10-26 Nopember 2017 kepada 3 orang Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) MAN Dompu.

zaman nabi Adam sampai dengan nabi Muhammad, sehingga harus dipeluk dan diikuti oleh semua umat manusia. Dengan demikian, menurut mereka, agama yang lain adalah salah karena sudah banyak dipengaruhi oleh yang lain. Yang menjadi landasan bagi semua informan adalah ayat al-Qur'an yang menyebutkan "*Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam*".

Demikian pula ketika peneliti menanyakan kedudukan kitab suci al-Qur'an di antara kitab-kitab suci yang lain, mereka berkeyakinan bahwa kitab suci al-Qur'an adalah kitab yang paling benar dan mengoreksi sekaligus menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Menurut mereka, kitab al-Qur'an adalah kitab yang mengandung kebenaran mengenai semua aspek kehidupan, sedangkan kitab-kitab yang lain telah banyak dikelirukan oleh penganut agamanya, sehingga dianggap tidak murni lagi.⁴

Dalam pengertian-pengertian ini, Islam adalah agama yang mengandung kesejahteraan dan keselamatan (*salvation*). Islam juga adalah agama tauhid, agama universal yang harus dipeluk oleh semua umat manusia, Islam adalah agama pamungkas, dan agama yang paling sempurna. Sifat-sifat demikian dilekatkan pada Islam, karena Islam datang dari Allah dan dibawa oleh nabi *akhiruzzaman*. Karena sifat-sifat itu, Islam harus didakwahkan untuk dipeluk oleh seluruh umat manusia, jika manusia menghendaki keselamatan.

⁴Wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 Nopember 2017. Informan yang diwawancarai adalah Guru-guru Pendidikan Agama Islam yang ada di Dompu di antaranya; Drs. Mansur, Dra. Mukarramah dan Drs. H. Djunaidi.

Pengertian ini didasari oleh pemahaman mereka terhadap penafsiran ayat al-Qur'an surat ali Imran [3]; 19: *"Sesungguhnya agama (yang diridloi) di sisi Allah hanyalah Islam"*, dan surat al-Shaf [61]: ayat 9: *"Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik benci"*.

Ungkapan "ajaran/ petunjuk segenap/ seluruh manusia" atau "ajaran sepanjang sejarah manusia" dari informan di atas mencerminkan klaim bahwa Islam adalah universal yang mempunyai misi inklusif, yaitu merangkul dan menyerap orang lain untuk masuk ke dalam pelukannya. Di sisi lain, terdapat kecenderungan untuk mengabaikan sejarah agama-agama yang telah berlangsung sekian lama yang telah membentuk karakter dan bentuk agama yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Klaim kebenaran dan universalitas di sini diikuti pula dengan mengidentifikasi orang lain (yang tidak seagama) salah. Begitu juga dengan kitab selain al-Qur'an yang turun terlebih dahulu adalah juga keliru karena banyak diselewengkan. Model klaim seperti ini tampak misalnya ketika peneliti menanyakan tentang apakah kitab suci al-Qur'an mengandung kebenaran semua aspek, apakah kitab selain al-Qur'an telah diselewengkan, dan apakah al-Qur'an mengoreksi dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya.

Dalam kerangka pemikiran pluralisme, ungkapan-ungkapan di atas jelas memperlihatkan klaim kebenaran dalam agama. Dengan klaim itu, terkandung muatan eksklusivisme yang mengidentifikasi diri

berbeda dengan yang lain dalam hal kebenaran di hadapan Tuhan. Pandangan ini kalau diimplementasikan sangat membuka peluang bagi munculnya konflik antaragama. Karena itu, kaum pluralis menganjurkan dilakukannya penafsiran alternatif terhadap konsep-konsep agama, juga terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasan mereka mendefinisikan Islam, sehingga diharapkan dapat melahirkan pemahaman tentang pengertian Islam yang lebih terbuka, yaitu Islam yang menghargai dan berinteraksi dengan pihak lain. Salah satu contoh penafsiran itu adalah seperti yang diperlihatkan oleh Frithjof Schuon.⁵ Dengan pendekatan perennial, Schuon melihat bahwa semua agama pada tataran *esoteris* (batin) mengandung nilai-nilai keabadian (universal) yang sama. Perbedaan-perbedaan antara satu agama dengan yang lain terjadi pada tataran *eksoteris* (lahir) ketika agama-agama terlibat dalam intensitas sejarah. Jika agama didekati dari sisi eksoterisnya, maka yang terlihat adalah perbedaan-perbedaan, tetapi jika dilihat dari sisi esoterisnya maka akan terdapat titik temu (*kalimatun sawa*) antara agama-agama.

1. Inklusivisme

Dalam memperoleh data tentang sikap inklusif ini, peneliti mendapatkan gambaran bahwa nuansa inklusif juga kadang-kadang muncul. Hal ini nampak ketika peneliti menanyakan tentang kedudukan Rasul Muhammad di antara Rasul-rasul yang lain dan aspek ajaran yang dibawanya. Misalnya dikatakan bahwa semua

⁵Lihat Frithjof Schuon, *Mencari Titik Temu Agama-Agama*, terj. Saifuddin Bahar (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987)

Rasul adalah utusan Allah yang membawa risalah/ ajaran yang sama yaitu tauhid, mengesakan Allah, bersifat *monoteisme*.⁶ Karena itu, Islam tidak membedakan Rasul-rasul Allah yang banyak itu, karena sebenarnya mereka semua mempunyai tugas yang sama, di antaranya adalah mengajarkan kebenaran dan melarang perbuatan-perbuatan maksiat.

Dalam topik lain, nuansa inklusivisme ini tergambar dengan jelas ketika menerangkan keutamaan-keutamaan nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, sebagaimana tergambar dari wawancara peneliti dengan bapak Drs. H. Mas'ud Hasan, bapak Drs. Masrur dan bapak Drs. H. Djunaidi:⁷ "Sebagai manusia biasa, nabi Muhammad pada dasarnya tidak berbeda dengan manusia lain atau nabi-nabi lain. Namun, Allah telah memberikan anugerah kepadanya berupa kemuliaan dan kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan manusia lain atau dengan nabi-nabi lain, karena ilmu-nya dan ketabahan serta keteguhan-nya. Kemuliaannya dapat dibuktikan dengan ketinggian akhlak dan jasa-jasanya yang telah berhasil mengangkat martabat manusia dari kehidupan yang kacau balau menjadi kehidupan yang aman, tenteram dan damai".

Namun di balik wawasan tentang nabi dan rasul di atas, terdapat kecenderungan untuk melakukan stratifikasi kenabian berdasarkan kiprah sejarah para nabi. Hal ini terlihat jelas ketika di

⁶Hampir seluruh informan memiliki pendapat sama tentang inisi ajaran yang dibawa oleh para Rasul, yaitu ajaran Tauhid.

⁷Wawancara dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2017

antara rasul-rasul tersebut ada yang mendapatkan sebutan *ulul azmi*, sebagai 'hadiah' karena ketabahan dan keteguhan hati yang sangat tinggi. Mereka adalah nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa dan nabi Muhammd. Di puncak tertinggi strata nabi itu terdapat nabi Muhammad bersama label-label keagungannya. Hal ini akan memberi rasa percaya diri kepada para pengikut nabi Muhammad untuk membangun komitmen keagamaan yang kokoh. Namun, dengan hal ini pula, tidak menutup kemungkinan lahirnya perasaan lebih tinggi dari yang lain yang hinggap dalam diri pengikut nabi Muhammad. Dengan kedudukan yang sedemikian tinggi, maka sudah sewajarnya Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad juga dianggap menaungi agama-agama lain.

2. Wawasan Pluralitas

Hampir seluruh informan yang berhasil diwawancarai mengakui bahwa setiap manusia memiliki insting beragama. Dalam hal ini, setiap manusia mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta, akan tetapi mereka berbeda di dalam menetapkan Tuhan yang diimani, disembah, sehingga ada yang mempertuhankan roh, pohon, matahari, ada konsep tri-nitas dan sebagainya. Perbedaan ini terkait dengan pengaruh dari berbagai macam pengetahuan yang masuk dalam diri manusia, yang mereka dapatkan dari lingkungan, tradisi, budaya, tetangga dan lain sebagainya. Mereka ada yang mengambil dasar "*Setiap manusia terlahir suci*". Suci di sini

diartikan sebagai insting beragama.⁸ Ada juga yang mengambil dasar adanya perjanjian antara Tuhan dengan Janin tentang pengakuan Janin terhadap keberadaan Tuhan Allah “*Alastu Birabbikum*”? “*Qalu Bala Syahidna.*”⁹

Dengan pernyataan di atas, maka dapat dikatakan terdapat kesadaran bahwa manusia meskipun berbeda di dalam mengidentifikasi Tuhan, namun sama-sama mengakui adanya Tuhan sang Pencipta Alam. Pengakuan tersebut terpatri dalam jiwa manusia sehingga membentuk apa yang dikenal dengan *religiusitas* atau rasa keberagamaan. Dengan kata lain, manusia di dalam perbedaannya memiliki kesamaan dalam kecenderungan mengakui hal-hal yang bersifat *transcendental*, yang kuasa di luar dirinya, terlepas dengan apa mereka menyebut obyek suci yang disadarinya tersebut.

Ketika peneliti menanyakan tentang perbedaan syariat yang di bawa oleh para Rasul sebagai bentuk wawasan pluralitas dalam beragama, sebagian peneliti mengakui adanya hal tersebut. Bahkan ada yang menyebut, ibarat orang mau ke Surabaya maka banyak jalan yang bisa dilalui, tergantung situasi dan kondisi yang dia hadapi.¹⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa secara akidah, ajaran yang dibawa oleh para Rasul adalah sama sedangkan secara syariat

⁸Sebagaimana yang diungkapkan bapak Mansur, bapak Masrur, bapak Ibu Mukarramah.

⁹Wawancara dengan Bapak Mansur, bapak Masud Hasan, dan bapak Djunaidi

¹⁰Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan bapak Masud Hasan di MAN Dompu

berbeda-beda. Menurut mereka, setiap umat oleh Allah swt diberi syariat yang berbeda-beda, sehingga syariat yang dibawa oleh nabi Nuh berbeda dengan syariat yang dibawa nabi Musa. Demikian juga syariat yang dibawa oleh nabi Isa berbeda dengan syariat yang dibawa nabi Muhammad. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan umatnya masing-masing.

Pernyataan di atas menunjukkan adanya kesadaran akan pluralitas agama. Akan tetapi pemikiran pluralitas dalam beragama seperti tersebut di atas kembali sempit ketika ditegaskan bahwa manakah di antara syariat yang dibawa oleh para nabi tersebut yang paling benar? Rata-rata mereka menjawab bahwa syariat yang dibawa nabi Muhammad adalah yang paling benar, karena syariat nabi Muhammad menyempurnakan syariat yang lain, sekaligus mengoreksi syariat nabi-nabi terdahulu yang telah banyak terkontaminasi oleh budaya lokal, pemikiran filsafat, tradisi dan sebagainya.

Di samping itu, kecenderungan antipluralisme juga nampak ketika peneliti menanyakan tentang keragaman dalam konteks ber-*"Bhineka Tunggal Ika"*. Sebagian informan meyakini bahwa keragaman tersebut bukanlah keragaman dalam agama, tetapi keragaman dalam suku, bahasa, budaya, gender, sosial dan sebagainya. Menurut mereka, konsep tersebut adalah pengakuan pemerintah dan bukan pengakuan seorang muslim. Di samping itu, konsep tersebut adalah merupakan cara pemerintah di dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bagi mereka

agama yang paling benar adalah tetap Islam. Menurut mereka, ungkapan al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, jenis kelamin yang berbeda, agar mereka saling membantu, mengasihi, berinteraksi sosial, adalah tidak termasuk perbedaan agama.

Dari pernyataan tersebut di atas jelas bahwa wawasan pluralitas dari yang diteliti masih sebatas pluralitas secara internal, karena kategori yang digunakan adalah kategori bangsa, negara, kelompok, suku, status sosial, warna kulit, gender yang terdapat dalam satu kelompok manusia, dan bukan kategori agama. Dengan demikian, pluralisme agama tidak benar-benar menjadi kesadaran yang hendak diwujudkan dalam pengalaman mereka di dalam pergaulan sehari-hari.

3. Toleransi

Sikap saling menghargai di dalam menjalankan aktifitas setiap hari, termasuk beribadah menurut agama masing-masing, saling menghormati, dan berbuat baik terhadap tetangga, dorongan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin telah muncul pada diri GPAI. Kebetulan dari semua informan memiliki tetangga non-muslim. Hal ini ditunjukkan ketika peneliti menanyakan beberapa hal yang terkait dengan toleransi, di antaranya: keharusan saling tolong menolong terhadap tetangga, saling membantu apabila ada dari non-muslim mendapatkan kesuasahan, saling bahu membahu di dalam melaksanakan kebaikan seperti kerja bhakti, iuran warga, membersihkan selokan dan

sebagainya, termasuk mencegah kemunkaran, seperti saling menjaga keamanan, menindak warga yang berbuat onar, mabuk-mabukan, dan yang membuat ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari pernyataan di atas, maka dapat ditemukan pelaksanaan prinsip-prinsip dalam hubungan manusia dengan manusia, bahwa dengan sesama manusia hendaknya saling bekerjasama dalam kebaikan, dan bukan dalam kejahatan. Dengan prinsip dasar ini, kerjasama atau tolong menolong dapat terjadi antarsesama individu, antarsesama masyarakat, atau antara individu dan masyarakat.

Dalam kegiatan beribadah, semua informan yang berhasil ditemui sangat menghargai bilamana terdapat warga yang non-muslim melaksanakan ritual-ritual keagamaan seperti pergi ke Gereja, mengadakan kumpulan yang membahas tentang agama yang mereka anut, termasuk perayaan Natal dan hari-hari besar lainnya. Begitu juga, ketika umat Muslim merayakan hari besar, tidak jarang umat non-muslim juga ikut mendukung dan menghargai. Hal ini menunjukkan, secara praktis bahwa toleransi antarumat beragama telah berjalan dengan baik dan GPAI dapat menjadi motor penggerak pelaksanaan sikap toleransi antarumat beragama di lingkungan masing-masing.

Begitu juga ketika mereka (GPAI) bergaul dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak sedikitpun mereka mengunggulkan agama yang mereka anut (Islam), tetapi justru sikap saling menghargai terhadap agama yang dianut oleh masing-masing warga,

Dengan demikian, toleransi dogmatis yang tidak menonjolkan keunggulan ajaran masing-masing agama telah berjalan dengan baik.

Ketika dimintai penjelasan tentang konsep "*Fastabiqul Khairat*" kaitannya dengan hubungan antariman. Peneliti mendapatkan informasi bahwa konsep tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar hubungan antarsesama manusia dalam melakukan karya sosial yang baik, dan berguna bagi orang banyak, lingkungan dan masyarakat, di antaranya adalah bekerjasama untuk mencegah kemunkaran dan bekerjasama berbuat kebajikan seperti, membangun jembatan warga, kebersihan sampah, lingkungan dan karya sosial lainnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Issa J Boullata, yang mendeskripsikan makna "*Fastabiqul Khairat*" dengan "*Manusia boleh berbeda, karena memang Tuhan menghendaki perbedaan itu, tetapi dalam perbedaan itu harus ada kerjasama dan berlomba-lomba dalam kebaikan*".¹¹

Ketika peneliti menanyakan tentang persoalan pendirian rumah ibadah di lingkungan umat muslim, sebagaimana yang menjadi perdebatan saat ini tentang dicabutnya SKB 2 menteri tentang pendirian rumah ibadah di wilayah yang banyak dihuni orang muslim, maka peneliti menemukan; pendirian rumah ibadah, Gereja, Vihara, Pura di lingkungan yang banyak didominasi umat muslim adalah diperbolehkan dengan syarat. Salah seorang informan (Nur) menyebutkan bahwa syarat diperbolehkannya pendirian rumah

¹¹Lihat Issa J. Boullata, "Fa-stabiqu al-Khairat: A Quranic Principle of Interfaith Relations" dalam Yvonna Y Haddad dan Wadi Z Haddad (eds), *Christian-Muslim Encounters* (Gainesville: University Press of Florida, 1995)

ibadah di lingkungan muslim adalah jarak tempat pendirian rumah ibadah tersebut jauh dengan rumah ibadah umat Islam (Masjid. Musholla) –bapak Nur tidak bisa menyebut berapa jarak antara kedua tempat ibadah tersebut-. Sementara itu, menurut bapak Drs, Jamal–salah seorang guru MAN Dompu menyebutkan bahwa didirikannya tempat ibadah di lingkungan muslim harus mendapatkan dukungan dari warga, dengan mengumpulkan 75% tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari warga setempat. Setelah itu, dirapatkan dalam tingkatan RW dengan mengundang seluruh RT untuk mendapatkan kesimpulan. Sementara itu, menurut bapak Jainal, menyebutkan bahwa bila ada sekelompok umat non-muslim yang ingin mendirikan rumah ibadah di lingkungan muslim tidak diperbolehkan, karena hanya menimbulkan masalah dikemudian hari. Oleh karena itu, pihak wakil masyarakat setempat, biasanya mendatangi mereka dan menyadarkan akan bahaya pendirian rumah ibadah di lingkungan umat Islam.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa kesadaran mereka akan pluralitas agama diuji. Karena dengan diperbolehkannya pendirian tersebut dengan syarat, atau dilarang sama sekali, menunjukkan bahwa kesadaran mereka akan arti pluralitas agama sangat rendah, sehingga dikhawatirkan munculnya konflik antaragama. Hal ini disebabkan, “pelarangan” tersebut sama halnya dengan mengkebiri hak-hak umat non muslim untuk melaksanakan ibadah di negara yang mengakui adanya pluralitas tersebut. Non muslim seakan akan

tidak diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing.

4. Dialog

Ketika peneliti menanyakan tentang keaktifan GPAI dalam mengadakan dialog dengan umat beragama dalam rangka menambah pengetahuan tentang iman orang lain, hampir semua informan tidak pernah melakukannya, hanya secara non-formal, sambil bersenda gurau. Begitu juga dengan mengikuti seminar tentang hubungan antar agama atau dialog antar iman, hampir tidak pernah dilakukan oleh informan, termasuk melalui pembacaan buku-buku tentang iman orang lain. Menurut mereka, apa yang dia imani adalah sudah lebih baik dan tidak perlu membaca atau menambah wawasan tentang agama lain,¹² (yang menurut mereka kebenarannya di bawah Islam).

Dari sini dapat dikatakan bahwa keengganan mereka untuk berdialog, membaca buku, mengikuti seminar tentang iman orang lain menunjukkan tidak adanya upaya untuk memahami pluralitas. Padahal musyawarah atau dialog adalah praktis yang harus dilakukan dalam suasana keragaman dan perbedaan, sehingga memungkinkan perbedaan itu berfungsi positif. Sebagaimana diketahui, manusia tidak bisa hidup sendiri, dalam hidup bermasyarakat dia memerlukan orang lain. Hidup bermasyarakat terjadi dari berbagai macam orang yang mempunyai tabiat dan sifat yang berbeda, termasuk beda

¹²Hal ini sebagaimana yang dikatakan Guru PAI MAN Dompu, yang juga seorang muballigh dan tokoh masyarakat

agama, kadang-kadang rukun, tenteram dan baik, dan kadang-kadang sebaliknya. Dalam menghadapi perbedaan kehendak dan pendapat para anggota masyarakat perlu melakukan dialog atau musyawarah, yakni merundingkan bersama-sama mencari titik temu dan mencari niali yang lebih baik dengan penuh keikhlasan dan saling menghormati.

Penekanan dialog yang hanya terjadi pada wilayah internal-antar umat Islam- menyebabkan penyempitan wawasan musyawarah menjadi eksklusif, sesuatu yang berbeda atau bertolakbelakang dari landasan konsepsionalnya, yaitu bermusyawarah dalam perbedaan untuk mencari kesamaan. Wawasan konsepsional dialog akan dapat ditransformasikan dengan baik melalui praksis dialog, jika disertai dengan pemahaman tentang bagaimana dialog digerakkan, yaitu semacam aturan atau etika dialog. Hal ini akan berkembang lebih jauh jika konteks dialog diperlebar ke wilayah agama.

5. Kerukunan Umat Beragama

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kerukunan intern umat beragama, maka diperoleh hasil/ kesimpulan, bahwa dengan mengutip ayat-ayat al-Qur'an mereka mengakui antara muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah saudara seiman dan seagama, juga saudara dalam hubungan kemanusiaannya. Yang mengikat persaudaraan itu adalah agama. Persaudaraan ini sangat kokoh karena memang dilandasi oleh kesamaan ideologi, yaitu Islam. Walaupun menurut bapak Mansur,

realitas di lapangan tidak jarang ditemui terjadinya perselisihan dan pertentangan antara sesama muslim.

Menurut mereka, orang yang satu agama, maka memiliki Tuhan yang sama, nabi yang sama, kitab yang sama, tujuan hidup yang sama, yaitu ingin memperoleh kebahagiaan hidup dunia akhirat. Persaudaraan yang terjalin antara sesama umat Islam ini menyangkut seluruh aspek kehidupan mulai dari masalah pribadi sampai kepada masalah kemasyarakatan, masalah ekonomi, kesehatan, dan bahkan sampai kepada masalah kenegaraan. Oleh karena itu, bila salah satu dari umat Islam memperoleh cobaan, kesusahan, penderitaan, maka umat Islam yang lain harus bisa merasakan pula cobaan, penderitaan, kesusahan tersebut. Sebaliknya, bila muslim yang satu mendapatkan Rahmat kebahagiaan, maka muslim yang lainpun merasakan kebahagiaan.

Dengan demikian, menurut mereka, sikap yang harus dibangun adalah rasa saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu, saling menolong antara sesama muslim dalam menghadapi persoalan kehidupan. Karena, suatu masalah tidak hanya menjadi beban perorangan, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama umat muslim.

Sementara itu, kaitannya dengan kerukunan antarumat beragama, maka peneliti memperoleh gambaran dari hasil wawancara sebagai berikut: Walaupun secara hubungan kemanusiaan mereka –umat non muslim- adalah saudara dengan muslim, tetapi mereka bukanlah saudara seagama, dan seiman. Namun demikian,

umat non-muslim dalam pergaulan sehari-hari dengan muslim adalah saudara yang juga harus dilindungi hak-haknya sebagai warga, harus dipergauli dengan baik, saling tolong menolong dalam kesusahan, saling bantu membantu dalam penderitaan, berjuang bersama-sama dalam kebaikan dan mencegah kemunkaran. Jadi, persaudaran ini dibatasi karena persaudaraan dalam hubungan kemanusiaan, bukan saudara dalam iman dan agama, namun mereka non muslim tetap tidak boleh dimusnahkan dan dihapuskan karena itu menyalahi fitrah agama.

D. Penutup

Berangkat dari data yang diperoleh dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka diperoleh kesimpulan bahwa corak pemahaman Guru-guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) terhadap pluralisme agama bersifat eksklusif dan terdapat kecenderungan antipluralisme dalam menyikapi berbagai macam. Keragaman agama. Hal ini ditandai dengan sikap penolakan terhadap pembicaraan-pembicaraan yang bersangkutan paut dengan persoalan-persoalan teologis antaragama. Menurut mereka, persoalan teologis adalah persoalan yang sudah selesai, final dan tertutup, sehingga tidak boleh dipertanyakan lagi kemutlakannya. Bentuk ekspresi dari pandangan mereka ini merupakan bentuk penolakan terhadap keabsahan agama lain selain Islam.

Pengakuan yang kurang positif terhadap agama lain ini, pada akhirnya juga mempengaruhi cara memahami keselamatan dalam agama. Pandangan mereka dalam permasalahan keselamatan agama

selain Islam sangat jelas dan tegas, yaitu mereka yang tidak beragama Islam adalah kafir dan musyrik, termasuk mereka yang tercakup dalam agama samawi. Konsekuensi dari kekafiran dan kemusyrikan mereka adalah ditolak oleh Allah, sehingga tidak akan selamat di akhirat kelak. Jadi, keselamatan identik dengan pengakuan akan keesaan Tuhan, penyembahan kepada-Nya dan hal semacam ini hanya ada pada agama Islam.

Secara teologis-normatif pandangan semacam ini mendasarkan diri pada sejumlah teks al-Qur'an yang memang memungkinkan untuk dipahami dalam kerangka eksklusivisme. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang apabila dipahami secara tekstual menyatakan bahwa hanya agama Islamlah yang paling benar di sisi Allah dan paling diridloi olehnya, sehingga jaminan keselamatan hanya diperoleh dengan menerima dan melaksanakan agama Islam. Keselamatan sangat tergantung pada beragama Islam dan tidaknya seseorang, karena keselamatan hanya menjadi milik umat Islam.

Kenyataan tersebut di atas sekaligus menunjukkan bahwa pluralitas agama cenderung hanya dipahami pada dataran fenomenal-sosiologis semata, sehingga cenderung terabaikan faktor eksistensialnya. Pluralitas agama hanya dilihat sebagai fenomena sosiologis kehidupan umat manusia dan bukan dipahami sebagai hal yang eksistensial dalam agama.

Namun, eksklusivisme teologis ini tidak secara otomatis menjadikan mereka bersikap tertutup secara sosiologis. Dalam tingkat tertentu, ternyata pandangan-pandangan teologis yang dikembangkan tidak serta merta menghambat mereka untuk berhubungan secara sosiologis

(muamalah) dengan umat non-muslim. Justru mereka memahami dan meyakini bahwa Islam memang mengajarkan demikian. Konsep Islam yang mereka pegangi adalah bahwa hubungan antaragama dapat dilakukan hanya sebatas pada persoalan hubungan kemanusiaan. Sehingga segala bentuk hubungan atau komunikasi yang melampaui permasalahan muamalah adalah dilarang, terutama dalam persoalan teologi (akidah). Karena hubungan dalam masalah teologi dikhawatirkan akan mencampuradukkan antara kebenaran Islam dan kepalsuan agama selain Islam.

Dalam konteks pluralitas agama, sikap yang memisahkan antara persoalan teologis dan sosial dalam membangun hubungan antarpenganut agama yang berbeda, akan memunculkan bentuk toleransi pasif. Toleransi pasif adalah sebuah bentuk hubungan antaragama yang lebih mencerminkan suatu perasaan berdiam diri dalam ketertutupan komunitas agama masing-masing, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman. Masing-masing kelompok menghindari untuk berbicara atau menyinggung persoalan-persoalan teologis, karena khawatir menimbulkan kesalahpahaman, Jadi, bukannya mendialogkan hal-hal yang menjadi sumber permasalahan untuk mencapai pemahaman antarsesama. Dengan kata lain, toleransi pasif merupakan bentuk hubungan antarumat beragama yang dalam istilah pergaulan disebut 'tahu sama tahu'.

Pola hubungan yang semacam ini tentu saja akan sangat rapuh terhadap tekanan-tekanan eksternal, karena tidak dibangun atas landasan yang kokoh. Pola hubungan harmonis yang berlangsung lebih

didasarkan pada tata krama dan penghormatan secara lahir semata. Sehingga kondisi optimal yang dapat dicapai hanyalah sekedar sangat kurangnya kesalahpahaman, bukan saling pengertian dan saling memahami. Dengan kata lain, toleransi semacam ini kurang kondusif bagi penciptaan kerukunan hubungan antaragama.

Daftar Rujukan

- Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep* (Yogyakarta: tiara wacana), 2004.
- Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat* (Jakarta: Rajawali Press), 2012.
- Ahmad Barizi, *Pendidikan Integratif: Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Malang: UIN-Maliki Press), 2011.
- Djohar, *reformasi dan masa depan pendidikan di indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1999.
- Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Penerbit Nuansa), 2001.
- Gianto, *Tesis: Signifikansi Paradigma Pendidikan Kritis di dalam Dunia Postrealitas*, 2012.
- H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta), 2009.
- H.A.R. Tilaar dkk, *Pedagogik Kritis : Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta), 2011.
- Imam Syafe'ie, *Konsep Guru Menurut Al-Ghazali: Konsep Filosofis Pedagogis* (Yogyakarta: Duta Pustaka), 1992.
- F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan Dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ed. Ke-III), 2009.
- , *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius,
- , *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
- Jürgen Habermas, *Knowledge and Human Interest* (Boston: Beacon Press, terj. Jeremy J. Shapiro), 1971.
- Joy A. Palmer, *Fifty Modern Thinkers on Education: From Piaget to the Present* (Yogyakarta: Penerbit Jendela, Terj. Farid Assifa), 2003.

- K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer: Inggris-Jerman* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-III), 1990.
- Listiono Santoso, dkk, *Epistemologi Kiri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet. Ke-9), 2012.
- Michael Pusey, *Habermas; Dasar dan Konteks Pemikiran* (Yogyakarta: Resist Book, cet. I, 2011).
- Martin Jay, *Sejarah Mazhab Frankfurt; Imajinasi Dialektis dalam Perkembangan Teori Kritis* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, terj. Nurhadi, cet. II), 2009.
- Martin Sardy. *Pendidikan Manusia* (Bandung: ALUMNI), 1985.
- Marguerite G. Lodico, Dean T. Spaulding, Katherine H. Voegtle, *Methods In Educational Research : From Theory To Practice* (San Francisco: Jossey-Bass), 2006.
- M. Agus Nuryanto, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik Dan Kekuasaan* (yogyakarta: Resist Book), 2008.
- Muh. Hanif. Dhakiri, *Islam Pembebasan* (Jakarta: Djembatan dan Pena), 2000.
- Mukhtar Buchori, *Pendidikan Antisipatoris* (Yogyakarta: Kanisius), 2001.
- Muhammd Karim, *Pendidikan Kritis Transformatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2009.
- Mahmud Arif, *Involusi Pendidikan Islam: Mengurai Problematika dalam Perspektif Historis-Filosofis* (Yogyakarta: Idea Press), 2006.
- Mukodi, *Mendialogkan Pendidikan Kita* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama), 2011.
- Moh. Yamin. *Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar dari Paulo Freire dan Kihadjar Dewantara* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), 2009.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola), 2001.
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya* (Jakarta: Kalam Mulia), 2009.
- Robert W. G. Smith, *Antonio Gramsci's Proposal for the Political Education of the Proletariat* (A Dissertation Submitted to the Department of Religion and Philosophy of the Faculty of Education of McGill University in Partial Fulfillment of the Requirements), 1988.

- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya), 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, cet. Ke-2), 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, cet. Ke-11), 2010.
- Sodiq A Kuntoro, *dimensi manusia dalam pemikiran pendidikan* (Yogyakarta: Nur Cahaya), 1985.
- Stiven M. Chan, *Pendidikan Liberal* (Yogyakarta: Kreasi Wacana), 2002.
- Syamsudin Asyrofi, *Beberapa Pemikiran Pendidika* (Malang: Aditya Media), 2012.
- Sutrisno, Fazlurrahman: *Kajian Terhadap Metode, Epistemologi Dan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006.
- Umiarso dan Zamroni, *Pendidikan Pembebasan Dalam Perspektif Barat Dan Timur* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2011.
- Raymond Guess, *Ide Teori Kritis; Habermas dan Mazhab Frankfurt* (Yogyakarta: Panta Rhei Books, terj. Robby H. Abror, 2004.
- Thomas McCarthy, *Teori Kritis Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, tej. Nurhadi, cet. III, 2009.

ISSN : 2252-3812

Vol. V No. 2 Edisi September 2016-Februari 2017

"AL-FURQAN"
Jurnal Studi Pendidikan Islam
